

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Kebijakan *pivot to Asia* merupakan kebijakan luar negeri yang diterapkan oleh Amerika Serikat pada masa pemerintahan Presiden Barack Obama. Kebijakan ini terinspirasi dari keinginan administrasi Obama untuk menciptakan suatu kawasan Asia yang damai, stabil serta sejahtera secara ekonomis. Mulainya *pivot to Asia* dapat dilihat melalui kebijakan Obama untuk mengurangi pasukan Amerika Serikat yang berada di Timur Tengah ataupun di Asia Selatan, seperti yang dilakukan di Irak dan Afghanistan (Caroll, 2017). Hal ini dilakukan agar Amerika Serikat dapat memberikan fokus yang lebih terhadap Asia, yang dipandang sebagai kawasan yang akan menjadi pusat aktivitas politik dan ekonomi dunia (Campbell & Andrews, 2013).

Kebijakan *Asia pivot* juga dikenal sebagai kebijakan *rebalance*, atau secara harfiah berarti perubahan fokus kebijakan luar negeri Amerika Serikat, yang sebelumnya terfokus pada kawasan Timur Tengah di masa pemerintahan Presiden George W. Bush, menjadi fokus terhadap kawasan Asia. Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintahan Obama untuk menjalankan *pivot to Asia* dapat terlihat pada kunjungan John Kerry, Sekretaris Negara Amerika Serikat pada tahun 2013, ke Korea Selatan, Jepang dan Tiongkok, dalam satu rangkaian waktu yang sama. Hal ini adalah kali pertama Sekretaris Negara Amerika Serikat melakukan hal tersebut (Schiavenza, 2013). Kegiatan politis lain yang dilaksanakan oleh Obama adalah dengan melakukan kunjungan ke Indonesia pada tahun 2010 (U.S. Department of State, n.d.).

Kunjungan yang dilakukan tersebut juga menghasilkan perjanjian *U.S.-Indonesia Comprehensive Partnership*, yang membuat segala kerja sama antara kedua negara berada

dalam satu wadah, meliputi perjanjian ekonomi, kesehatan, keamanan, dan juga pendidikan. Dengan dibentuknya perjanjian tersebut, terlihat bahwa sebelumnya kedua negara sudah memiliki hubungan yang cukup komprehensif dalam bidang-bidang yang variatif (Bayuni, 2010). Hal ini juga menunjukkan bahwa baik Indonesia dan Amerika Serikat memiliki kepentingan strategis di antara keduanya.

Indonesia sendiri memiliki dasar hukum politik luar negerinya dalam Undang-undang Dasar (UUD) 1945 serta Undang-undang (UU) no. 37 tahun 1999. Di dalam UUD 1945, dijabarkan bahwa Indonesia diharuskan untuk:

“Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial” (DPR RI, n.d.)

Hal ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam UU no. 37 tahun 1999, yang menerangkan bahwa politik luar negeri Indonesia menggunakan prinsip bebas aktif, yang berlandaskan pada kepentingan nasional Indonesia (Biro KTLN Setneg, 1999).

Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sendiri, Indonesia menerapkan kebijakan politik luar negeri yang disebut dengan nama *a million friends and zero enemies*, atau memiliki sejuta teman dan tidak memiliki musuh. Hal ini berakar pada kepercayaan pemerintahan Yudhoyono yang memandang bahwa Indonesia tidak memiliki negara yang dianggap sebagai musuh oleh Indonesia. Begitu pula sebaliknya, tidak terdapat negara yang menganggap Indonesia sebagai musuh (Picone & Yusman, 2014).

Kebijakan *a million friends and zero enemy* juga dapat dilihat sebagai suatu penerapan politik luar negeri Indonesia yang berprinsip bebas dan aktif, karena dari kebijakan tersebut SBY berusaha untuk memaksimalkan peranan Indonesia dalam kancah internasional dengan slogan tersebut. Penerapan kebijakan ini juga dapat dilihat sebagai suatu langkah bagi

pemerintahan SBY untuk menunjukkan kepada dunia internasional tentang bagaimana Indonesia, dengan memiliki presiden terpilih secara langsung setelah beberapa saat, menjalankan politik luar negerinya. Hubungan antara Indonesia dan Amerika Serikat sendiri dapat dilihat sebagai hubungan yang komprehensif, yang mana terdapat berbagai kerja sama dalam berbagai bidang, seperti dalam bidang ekonomi, pendidikan, lingkungan serta keamanan dan pertahanan (U.S. Embassy & Consulates in Indonesia, n.d.).

Urgensi untuk meneliti respon Indonesia terhadap kebijakan poros Asia yang dicanangkan oleh Amerika Serikat pada masa pemerintahan Yudhoyono sendiri terdiri dari beberapa hal. Pertama, penamaan kebijakan *pivot to Asia* baru dilakukan ketika Barack Obama menjalani masa kepresidenannya, sehingga kebijakan tersebut secara resmi diterapkan ketika ia menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat (Schiavenza, 2013). Kedua, penelitian ini dapat melihat bagaimana Yudhoyono menerapkan prinsip *a million friends and zero enemies* terhadap kebijakan *pivot to Asia* (Picone & Yusman, 2014).

Kebijakan Yudhoyono tersebut juga dapat dijadikan sebagai pondasi bagi pemerintahan Joko Widodo untuk menjalankan kebijakan Indonesia sebagai poros maritim dunia (Maksum, 2015). Pondasi yang diciptakan sendiri adalah dengan melakukan berbagai jenis diplomasi dan menjaga hubungan yang baik dengan rekan strategis Indonesia, sehingga menetapkan posisi Indonesia dalam perpolitikan dunia. Ketiga, masa pemerintahan Yudhoyono pada kedua periode (2004-2009 dan 2009-2014) (VIVA News, n.d.) bersinggungan secara langsung dengan Barack Obama (2008-2012 dan 2012-2016) (The White House, n.d.), sehingga akan lebih sesuai untuk menganalisis respon Indonesia pada masa Yudhoyono dibandingkan pada masa Joko Widodo.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, dapat dilihat bahwa Amerika Serikat melihat Asia sebagai kawasan yang strategis, baik secara politik dan ekonomi. Penerapan kebijakan *pivot to Asia* merupakan langkah yang digunakan oleh Amerika Serikat untuk menjamin pengaruhnya di kawasan tersebut, termasuk salah satunya di Indonesia. Dengan demikian, permasalahan yang diambil oleh penulis adalah **bagaimana analisis terhadap kebijakan Indonesia dalam merespon kebijakan *Pivot to Asia* Amerika Serikat pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono?**

1.3.Tujuan Penelitian

- i. Untuk menganalisa respon Indonesia terhadap kebijakan *pivot to Asia* Amerika Serikat.
- ii. Untuk menganalisa kepentingan Indonesia dalam merespon kebijakan *pivot to Asia* Amerika Serikat.
- iii. Untuk melihat bagaimana Amerika Serikat menerapkan kebijakan *pivot to Asia* terhadap Indonesia.

1.4. Signifikansi

- i. Belum terdapat penelitian lain yang membahas bagaimana Indonesia merespon kebijakan *pivot to Asia*, terutama melalui sudut pandang Konstruktivisme.
- ii. Menjadi pelengkap terhadap penelitian lain yang mengkaji *pivot to Asia*, khususnya dalam melihat respon aktor negara lain terhadap kebijakan yang diterapkan A. S. tersebut.
- iii. Menjadi sumbangsih bagi pemerintah Indonesia dalam menerapkan kebijakan luar negeri di masa depan.
- iv. Menjadi dasar pertimbangan pemerintah Indonesia untuk melaksanakan politik luar negerinya, khususnya terhadap Amerika Serikat.

1.5. Lingkup Penelitian

- i. Lingkup waktu yang diambil pada penelitian ini berkisar sejak tahun 2008 hingga tahun 2014. Lingkup waktu ini diambil karena kebijakan *pivot to Asia* dilakukan oleh Amerika Serikat di masa pemerintahan Barack Obama (2008-2014) dan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014), sehingga digunakan waktu yang bersinggung ketika kedua presiden menjabat di negaranya masing-masing, yaitu pada tahun 2008-2014.
- ii. Lingkup tingkat analisis yang digunakan terdiri dari dua tingkat, yaitu tingkat individu Yudhoyono dan tingkat negara, yaitu Indonesia.

1.6. Kajian Pustaka

Pivot to Asia merupakan kebijakan Amerika Serikat yang diterapkan pada masa pemerintahan Obama. Seperti yang dijelaskan dalam buku “*US Foreign Policy*”, mengubah poros kebijakan ke Asia merupakan langkah yang dilakukan Obama untuk memindahkan fokus tersebut dari kawasan Timur Tengah. Sebelumnya, pemerintahan George W. Bush dianggap terlalu terfokus terhadap Timur Tengah dan administrasi Obama melihat bahwa hal tersebut harus dihentikan. Hal ini juga berkaitan dengan situasi yang terjadi di Timur Tengah, yaitu *Arab Spring*, yang merubah kondisi politik di kawasan tersebut dengan cepat. Perubahan kondisi politik yang berlangsung secara cepat tersebut membuat Amerika Serikat pada masa pemerintahan Obama kesulitan untuk bereaksi terhadap kondisi tersebut (Cox & Stokes, 2012).

Penjelasan tentang bagaimana Amerika Serikat menjalankan perubahan poros tersebut dapat dilihat pada tulisan “*Explaining the US ‘Pivot’ to Asia*”. Dijelaskan bahwa Amerika Serikat menjalankan langkahnya di Asia dengan memperkuat aliansi yang ada dengan sekutunya seperti Jepang, Korea Selatan, Filipina, Thailand dan Australia. Selain itu Kim

melihat bahwa Amerika Serikat berusaha untuk menjalin hubungan yang lebih baik dengan Tiongkok, Singapura, Taiwan, Indonesia, Vietnam dan India untuk mencapai *pivot to Asia* tersebut. Kim juga berpendapat bahwa Amerika Serikat menjalin hubungan yang lebih intensif dengan ASEAN dan negara tersebut pun dinilai olehnya berusaha untuk meningkatkan kehadiran militer di kawasan Asia Tenggara dengan cara melakukan latihan militer gabungan, bantuan humaniter atau pengiriman pasukan (Campbel & Andrews, 2013). Dalam tulisan ini, sudah disebutkan bahwa perubahan poros ke Asia tidak hanya tentang bagaimana pemerintahan Amerika Serikat masa Obama menghindari instabilitas politik di Timur Tengah, seperti yang dijelaskan pada buku *US Foreign Policy* di atas, tetapi juga dijabarkan seberapa penting kawasan Asia terhadap Amerika Serikat.

Sementara itu di dalam tulisan "*The Dynamics of US-China-Southeast Asia Relations*" diterangkan bahwa Asia Tenggara merupakan suatu kawasan yang sangat strategis bagi Amerika Serikat dan *pivot to Asia* merupakan suatu kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang bisa dikatakan cukup penting, sehingga dilakukan deklarasi yang dilakukan Obama terhadap kebijakan *pivot to Asia* pada tahun 2011 tersebut. Disebutkan bahwa kawasan tersebut merupakan wilayah strategis bagi kepentingan domestik dan luar negeri Amerika Serikat secara jangka panjang. Selain itu, merubah fokus ke Asia juga dilakukan untuk menekankan pengaruh Amerika Serikat di kawasan tersebut melalui penguatan hubungan perekonomian dengan negara-negara di Asia-Pasifik. Juga disebutkan bahwa merubah poros dari Timur Tengah ke Asia sebagai langkah untuk mengurangi ketegangan pada konflik di Afghanistan dan Irak, sehingga sumber daya yang dimiliki oleh Amerika Serikat dapat lebih terfokus pada Asia. Di dalam tulisan ini juga Bates menambahkan tantangan yang dihadapi Amerika Serikat seperti transisi pemerintahan domestik yang menyebabkan masih kurang jelasnya arah gedung putih dalam kebijakan luar negeri selanjutnya, terutama dalam menjadikan Asia sebagai fokusnya. Mengenai hubungan antara Amerika Serikat dan Indonesia, dijelaskan bahwa Indonesia dan

Amerika Serikat sudah beberapa kali terlibat dalam kerja sama militer, seperti pembelian alutsista serta latihan militer gabungan (Gill, Goh, & Huang, 2016). Tulisan Gill melengkapi penjelasan pada tulisan *The Dynamics of US-China-Southeast Asia Relations*, yaitu mengenai kepentingan Amerika Serikat di Asia yang tidak hanya sebagai merubah fokus dari Timur Tengah, yang mana hal tersebut dijelaskan pada buku *US Foreign Policy*, tetapi sebagai pelaksanaan politik luar negeri Amerika Serikat untuk kepentingan nasionalnya dalam jangka panjang.

Memberikan fokus kepada Asia sendiri bukan merupakan hal yang baru bagi Amerika Serikat. Seperti yang dijelaskan pada buku “*Obama’s Challenge to China: The Pivot to Asia*”, Amerika Serikat telah terlibat di Asia dalam beberapa hal, seperti Perang Korea, penerapan *containment policy* setelah Perang Korea, keterlibatan pada Perang Vietnam ataupun ketidakinginan Amerika Serikat untuk menghadapi perubahan kondisi politik di Asia – yang mana merupakan langkah untuk mencegah komunisme. Hal tersebut merupakan hal-hal yang dilakukan Amerika Serikat pada masa perang dingin. Setelah perang dingin berakhir, Amerika Serikat masih memiliki kepentingan yang cukup besar terhadap Asia. Hal ini terlihat dengan usaha George H.W. Bush yang ingin mempertahankan hubungan yang baik dengan Tiongkok pada masa pemerintahannya (Wang, 2015). Penjelasan dalam buku ini memberikan gambaran baru mengenai kepentingan Amerika Serikat di Asia, bahwa merubah fokus ke Asia bukan hanya tentang mengubah fokus dari Timur Tengah ke Asia atau meningkatkan pengaruh dan hubungan perekonomian dengan negara-negara di kawasan, tetapi ditegaskan bahwa Amerika Serikat memiliki kepentingan strategis di Asia sejak dulu dan kepentingan tersebut kembali dijalankan pada pemerintahan Obama.

Untuk mengetahui bagaimana Indonesia merespon kebijakan tersebut, terdapat tulisan yang menjabarkan bagaimana dasar politik luar negeri Indonesia – politik luar negeri bebas aktif – dijalankan dan dirancang. Hal ini dapat dilihat pada buku berjudul “*Satu Abad Bung Hatta*:

Demokrasi Kita, Bebas Aktif, Ekonomi Masa Depan”. Pada dasarnya, di dalam buku tersebut terdiri dari pidato-pidato Hatta pada mengenai beberapa isu, seperti demokrasi Indonesia, politik luar negeri bebas aktif serta proyeksi Hatta mengenai ekonomi Indonesia di masa yang akan datang (Hatta, 2002). Di sini, penulis akan berusaha untuk memahami gagasan politik luar negeri bebas dan aktif serta dasar-dasarnya yang dikemukakan oleh Hatta melalui pidatonya pada beberapa kegiatan.

Hasil dari pemahaman mengenai politik luar negeri bebas aktif pada buku di atas akan dihubungkan dengan bagaimana Yudhoyono menjalankan politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahannya. Hal ini dapat dipahami melalui sebuah tulisan berjudul “*Indonesia on the Move*”. Tulisan ini terdiri dari pidato-pidato serta wawancara yang dikemukakan oleh Yudhoyono dalam berbagai kegiatan, yang mana juga terdapat pidato mengenai isu politik luar negeri (Yudhoyono, 2006). Pidato yang disampaikan oleh Yudhoyono mengenai politik luar negeri akan membantu untuk memahami bagaimana ia menjalankan politik luar negerinya semasa ia menjabat sebagai Presiden Indonesia.

Pemahaman lebih lanjut akan tulisan di atas akan dilangsungkan melalui buku “*Biografi Politik Susilo Bambang Yudhoyono*”. Di dalam buku tersebut, dijelaskan banyak hal mengenai bagaimana sejarah politik Yudhoyono serta bagaimana ia mengambil kebijakan semasa beliau memerintah (Maeswara, Biografi Politik Susilo Bambang Yudhoyono, 2009). Tulisan ini akan berguna untuk memahami karakteristik Yudhoyono sebagai aktor di dalam teori Konstruktivisme, sehingga penulis akan dapat menganalisis respon Indonesia pada masa pemerintahan Yudhoyono terhadap kebijakan poros Asia melalui pemahaman latar belakang Yudhoyono.

1.7. Kerangka Konsep

Teori Konstruktivisme

Dalam bidang ilmu hubungan internasional, Konstruktivisme merupakan suatu pendekatan yang dapat dikatakan berbeda dengan pendekatan lainnya seperti pendekatan liberal dan realis. Pendekatan Konstruktivisme sendiri memiliki fokus terhadap peranan manusia/individu dalam dunia hubungan internasional, berbeda dengan pendekatan realis dan liberal yang lebih melihat bahwa aktor internasional memiliki kemiripan perilaku dalam tindakan mereka. Dalam hal ini, Konstruktivisme sendiri memiliki beberapa asumsi dasar seperti konsep anarki, kekuasaan, kepentingan, ataupun hubungan agen-struktur (Rosyidin, 2015, pp. 1-29).

Dijelaskan di dalam teori Konstruktivisme, terdapat dua perbedaan, yaitu antara pihak modernisme dan post-modernisme. Meskipun demikian, kedua sisi tersebut berusaha untuk memberikan penjelasan melalui tiga dalil ontologis tentang kehidupan sosial. Pertama, untuk menjelaskan bahwa struktur dapat membentuk tingkah laku atau langkah yang diambil suatu aktor politik, baik itu negara ataupun individu (Burchill, et al., 2005, pp. 196-199).

Konstruktivisme memandang bahwa struktur normatif atau gagasan memiliki nilai yang sama penting dengan struktur materi. Struktur materi yang dimaksud adalah seperti keseimbangan kekuatan militer yang dikemukakan oleh pihak neo-realis, atau ekonomi kapitalis yang dicanangkan oleh pihak marxis. Dalam hal ini, Konstruktivisme memandang sistem yang terdiri dari gagasan-gagasan, kepercayaan, dan nilai juga memiliki karakter yang bersifat struktural, dan struktur tersebut dapat memberikan pengaruh yang besar

dalam bagaimana tindakan politik atau sosial dilakukan (Burchill, et al., 2005, pp. 196-199).

Terdapat dua hal yang membuat Konstruktivisme berusaha mempertahankan struktur di dalam teori ini. Pertama, pihak konstruktivis melihat bahwa sumber daya material hanya dapat menjelaskan tindakan suatu individu melalui struktur yang terdapat pembagian gagasan di dalamnya, yang juga melihat di mana suatu individu tersebut berada. Kedua, pihak konstruktivis menekankan pentingnya struktur normatif dan gagasan, karena hal tersebut lah yang membentuk identitas sosial dari aktor-aktor politik. Sama seperti norma-norma yang terdapat dalam dunia akademik membentuk identitas seorang profesor, norma-norma dari sistem internasional pun membentuk identitas sosial dari pada suatu negara yang berdaulat (Burchill, et al., 2005, pp. 196-199).

Dalil kedua yang dikemukakan oleh Konstruktivisme adalah, dengan memahami bagaimana struktur non-materi membentuk identitas suatu aktor merupakan hal yang penting, karena identitas dapat menghasilkan kepentingan, yang pada akhirnya akan berbuah pada tindakan aktor tersebut. Dalam hal ini, Konstruktivisme melihat bahwa dengan memahami bagaimana suatu aktor membangun kepentingannya merupakan hal yang penting, agar Konstruktivisme dapat menjelaskan fenomena politik internasional yang sangat luas, berbeda dengan pihak rasionalis dalam beberapa hal tidak mempedulikan atau gagal memahami suatu fenomena politik internasional.

Dalam menjelaskan bentuk dari suatu kepentingan, konstruktivisme berusaha fokus pada identitas sosial dari suatu individu ataupun negara. Melihat pada contoh dalam dalil pertama, dengan menjadi seorang akademisi, seseorang akan memiliki kepentingan-kepentingan tertentu, seperti melakukan riset dan publikasi (Burchill, et al., 2005, pp. 196-199).

Dalam dalil ketiga, Konstruktivisme melihat bahwa baik agen maupun struktur memiliki sifat yang saling membentuk. Struktur normatif dan gagasan, dalam Konstruktivisme, membentuk identitas dan kepentingan suatu aktor, tetapi struktur tersebut tidak akan tercipta apabila aktor-aktor tersebut tidak melakukan sesuatu hal yang membentuk suatu struktur tersebut.

Dalam gagasan yang dikemukakan Alexander Wendt, kekuatan yang dapat datang dari struktur serta ketertarikan dari beberapa konstruktivis untuk mempelajari bagaimana norma membentuk suatu kebiasaan memberikan gambaran bahwa konstruktivis adalah strukturalis, seperti neo-realist serta marxis (Burchill, et al., 2005, pp. 196-199).

Tetapi, apabila dilihat secara lebih dekat, terdapat pandangan bahwa konstruktivis dapat diklasifikasikan sebagai *structurationist*, dengan menekankan pada dampak dari struktur non-materi terhadap identitas dan kepentingan, tetapi, hal ini juga sama pentingnya dengan peranan dari langkah-langkah yang dilakukan dalam mempertahankan serta mentransformasi struktur-struktur yang ada. Norma-norma yang dijadikan kebiasaan membentuk definisi dan identitas suatu aktor individu dan bagaimana pola dari kegiatan ekonomi, politik, serta budaya yang dilakukan oleh individu secara baik.

Selain itu, melalui hubungan timbal balik maka kita dapat membentuk struktur sosial yang dapat bertahan, dalam hal bagaimana kita menjelaskan identitas serta kepentingan yang kita miliki (Burchill, et al., 2005, pp. 196-199).

Contohnya, dalam hal akademik, terdapat norma-norma akademik yang memberikan individu tertentu sebuah identitas akademik, yang secara tidak langsung membuat seorang akademisi memiliki kepentingan terhadap riset dan publikasi. Tetapi hanya melalui kegiatan akademis yang rutin dan dibiasakan lah yang dapat membuat suatu norma tetap ada dan dapat berlanjut seterusnya (Burchill, et al., 2005, pp. 196-199).

Dalam melihat anarki, pendekatan Konstruktivisme menilai bahwa anarki merupakan hasil dari pemikiran aktor terhadap suatu permasalahan atau suatu isu, tidak hadir begitu saja. Berbeda dengan apa yang diungkapkan dalam pendekatan liberal yang menjelaskan bahwa di dalam anarki dapat berlangsung suatu kegiatan kerja sama dan kerja sama ini merupakan langkah yang diciptakan agar tidak terjadi mispersepsi antar negara. Sedangkan pendekatan realis lebih menganggap bahwa anarki merupakan sumber daripada suatu konflik-konflik tidak dapat dihindari karena dunia yang anarki (Rosyidin, 2015, pp. 19-20).

Anarki sendiri memiliki beberapa jenis seperti Hobbesian, Lockean dan Kantian. Hobbesian melihat bahwa aktor bergerak berdasarkan prinsip *sauve qui peut* dan membunuh atau dibunuh, yang artinya adalah negara tidak dapat mengandalkan negara lainnya untuk mendapatkan pertolongan ataupun dalam hal kepercayaan. Lalu Lockean memandang anarki tidak tentang permusuhan, tetapi persaingan. Yang dimaksud disini adalah negara memandang negara lainnya tidak terlalu membahayakan, menghormati negara lain dengan mengakui kedaulatannya, dan tidak berusaha untuk menyerang dan merebut negara lainnya (Wendt, 1999).

Sedangkan Kantian melihat didasarkan pada hubungan pertemanan, tidak memandang negara lain sebagai pesaing atau bahkan ancaman. Penganut budaya Kantian ini berusaha untuk menyelesaikan permasalahan dengan tidak melakukan peperangan, tetapi dengan menggunakan cara lain seperti negosiasi (Wendt, 1999).

Selain konsep anarki, kekuasaan merupakan salah satu konsep yang mendasari pendekatan Konstruktivisme. Konstruktivis melihat bahwa bukanlah hal yang bersifat materi yang menjadi poin utama dalam kekuasaan, tetapi lebih kepada gagasan. Konsep lainnya adalah konsep kepentingan. Konsep ini sering dikaitkan dengan sebutan kepentingan nasional suatu negara. Konstruktivisme memandang kepentingan sebagai

suatu hal yang tercipta karena suatu hal lainnya, bukan secara instan negara tiba-tiba memiliki kepentingan nasional (Rosyidin, 2015, p. 26).

Contoh yang dapat diambil adalah ketika Tiongkok berusaha menganeksasi kepulauan Senkaku milik Jepang, maka secara otomatis Jepang akan berusaha menjaga kepulauan tersebut karena hal itu merupakan kepentingan nasional Jepang untuk menjaga kedaulatannya. Selain itu juga terdapat konsep hubungan agen-struktur. Konstruktivis menilai bahwa terjadi hubungan timbal balik antara agen dan struktur, yang artinya adalah agen memiliki dampak terhadap struktur dan begitu juga sebaliknya (Rosyidin, 2015, p. 26).

1.8. Metode Penelitian

Pada penelitian ini, akan digunakan metode penelitian kualitatif, yang akan membuat penulis membentuk suatu analisis dengan data-data yang dikumpulkan melalui studi literatur, sehingga nantinya akan diolah serta dianalisis agar tercapai suatu kesimpulan (Sarwono, 2006). Teknik penelitian pustaka akan digunakan pada penelitian ini. Artinya, akan dicari data-data mengenai topik yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian ini melalui berita, jurnal, buku, serta literatur lainnya (Umar, 2012)

Terdapat dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah data yang didapatkan dari dokumen-dokumen Negara Indonesia, serta sumber sekunder dapat didapatkan dari jurnal, berita, atau literatur lainnya yang dapat digunakan guna menunjang penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah bersifat deskriptif. Setelah data dikumpulkan, maka kemudian data akan diolah menjadi sebuah kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah penelitian ini. (Lezi, 2011)

